



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT UTAMA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : M. NASHRUL WAJDI
2. Jabatan : KEPALA BIRO
3. NHK : 910701

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 96 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA BANDUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 38.500.000

1. MOTOR, HONDA MATIC Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
2. MOTOR, SUZUKI MATIC Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
3. MOTOR, HONDA SCOOPY Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
4. MOTOR, YAMAHA FILANO Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 3.000.000

D. SURAT BERTAHAPAN

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 570.034.847

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.611.534.847

III. HUTANG

Rp. 347.892.759

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.263.642.088

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.